

PERAN KEPEMIMPINAN NASIONAL DALAM MEMBANGUN STABILITAS SOSIAL DAN POLITIK DI INDONESIA

Rakha Muna Mushaddaq¹, Anwar Nurhuda², Rusyda Nasyita Rahman³, Danang Ade Agustinova⁴

¹²³⁴Universitas Negeri Yogyakarta

Email: rakhamuna.2022@student.uny.ac.id, anwarnurhuda.2022@student.uny.ac.id, rnasyita@uny.ac.id, danangadeagustinova@uny.ac.id



DOI : <https://doi.org/10.46245/jp>

Sections Info

Article history:

Submitted: 23 November 2022

Final Revised: 11 Januari 2023

Accepted: 16 Januari 2023

Published: 31 Januari 2023

Keywords:

Adaptive Leadership

Quality Education

Inclusive Policies

Social Stability

Sustainable Development

ABSTRACT

Adaptive leadership, quality education, and inclusive policies serve as the foundation for building social and political stability. This study aims to analyze the role of these three elements in fostering a harmonious and peaceful society in Indonesia. A qualitative approach was employed, drawing on relevant literature and secondary data. The findings indicate that adaptive leadership effectively addresses social and economic dynamics, quality education supports character and skill development, while inclusive policies encourage the participation of various groups in development processes. The collaboration among these elements creates an environment conducive to economic growth, security, and social welfare. Therefore, visionary and responsive leadership strategies are key to Indonesia's sustainable development in the future.



ABSTRAK

Kepemimpinan adaptif, pendidikan berkualitas, dan kebijakan inklusif merupakan fondasi utama dalam membangun stabilitas sosial dan politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ketiga elemen tersebut dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai di Indonesia. Pendekatan kualitatif digunakan dengan mengacu pada literatur dan data sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan adaptif mampu merespons dinamika sosial dan ekonomi, pendidikan berkualitas mendukung pengembangan karakter dan keterampilan masyarakat, sedangkan kebijakan inklusif mendorong partisipasi berbagai kelompok dalam proses pembangunan. Kolaborasi antara elemen-elemen ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi, keamanan, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, strategi kepemimpinan yang visioner dan responsif menjadi kunci keberlanjutan pembangunan Indonesia di masa depan.

Kata kunci: Kepemimpinan Adaptif, Pendidikan Berkualitas, Kebijakan Inklusif, Stabilitas Sosial, Pembangunan Berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Stabilitas sosial dan politik merupakan faktor utama yang mendukung pembangunan nasional, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Stabilitas politik dan keamanan adalah prasyarat untuk kemajuan sebuah bangsa, dan peran strategis Polri ini penting untuk menciptakan rasa aman, kepastian hukum, serta mengawal pembangunan ekonomi di dalam negeri. Stabilitas politik sangat berdampak terhadap ekonomi. Semakin stabil kondisi politik, semakin tinggi minat investor untuk berinvestasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan harga saham. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa stabilitas politik berkontribusi pada iklim investasi yang lebih baik (Basit, 2021).

Sebagai negara dengan keberagaman budaya, agama, dan etnis, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga harmoni sosial dan stabilitas politik, terutama di era globalisasi dan digitalisasi. Selain itu, pemikiran politik Nicholas Machiavelli menunjukkan bahwa penguasa harus memisahkan kekuasaan dari konteks etika dan berfokus pada kepentingan rakyat untuk mencapai stabilitas politik yang baik, jika kekuasaan digunakan untuk kepentingan golongan tertentu, maka stabilitas politik akan terganggu (Syarofuzzaman & Al-Hamid, 2024). Sehingga pemimpin memiliki sebuah tantangan untuk bersikap netral dan memenuhi kebutuhan setiap golongan masyarakat Indonesia yang beragam. Selain pemimpin stabilitas politik memiliki tantangan besar terhadap media yang meliput tokoh pemimpin terkhususnya *buzzer* politik. Fenomena pendengung (*buzzer*) yang digunakan oleh elit politik untuk membangun citra positif atau merusak citra lawan juga berkontribusi pada polarisasi masyarakat, yang berdampak negatif pada stabilitas politik (Syarofuzzaman & Al-Hamid, 2024).

Kepemimpinan nasional memiliki peran strategis dalam menyatukan visi, mengelola konflik, dan membangun kepercayaan publik untuk menciptakan kondisi sosial dan politik yang stabil. Kepemimpinan nasional yang baik mampu menciptakan visi dan strategi yang jelas untuk masa depan. Hal ini membantu dalam menyelaraskan tujuan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah, sehingga mengurangi konflik dan meningkatkan kerjasama (Widhi Cahyono et al., 2021). Penelitian ini relevan karena memahami peran kepemimpinan nasional dalam membangun stabilitas sosial dan politik dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan kebijakan yang efektif dan adaptif terhadap tantangan di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Memengaruhi stabilitas sosial dan politik melalui analisis fenomena, interaksi, dan konteks budaya-politik. Dalam kualitatif, penulis akan mendeskripsikan masalah penelitian yang paling baik dipahami dengan mengeksplorasi konsep atau fenomena (Creswell, 2013). Kmudin dalam pengumpulan data menggunakan studi Pustaka. Mengumpulkan dan menganalisis literatur terkait kepemimpinan, stabilitas sosial, dan politik, baik dari sumber primer (dokumen pemerintah, pidato pemimpin) maupun sekunder (jurnal ilmiah, buku, dan laporan). Menggunakan dokumen resmi seperti kebijakan nasional, undang-undang, atau pernyataan presiden untuk memahami pola kepemimpinan dan dampaknya terhadap stabilitas. Memilih contoh konkret dari periode kepemimpinan tertentu di Indonesia, seperti era Soekarno, Soeharto, atau Jokowi, untuk menganalisis pendekatan yang digunakan dalam membangun stabilitas. Menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama yang muncul dari data, misalnya gaya kepemimpinan, strategi membangun harmoni, atau pengelolaan konflik sosial-politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

a. Konsep Dasar Kepemimpinan Nasional

Kepemimpinan nasional dapat didefinisikan sebagai proses di mana individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan dan pengaruh memandu masyarakat dalam mencapai tujuan bersama demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Proses ini melibatkan pengambilan keputusan strategis yang tidak hanya mempengaruhi aspek politik, tetapi juga sosial dan ekonomi. Kepemimpinan nasional berperan penting dalam menciptakan stabilitas, mendorong partisipasi masyarakat, dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Karakteristik utama dari kepemimpinan nasional meliputi visi yang jelas, integritas, kemampuan memotivasi, keterampilan komunikasi, dan kepemimpinan kolaboratif. Visi yang jelas merupakan landasan dari setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin. Pemimpin yang memiliki visi mampu menginspirasi masyarakat dan memberikan arah yang jelas bagi pembangunan negara. Integritas, di sisi lain, mencakup kejujuran dan etika tinggi yang diperlukan untuk membangun kepercayaan publik. Tanpa integritas, sulit bagi pemimpin untuk meyakinkan masyarakat akan niat baik dan kebijakan yang diusulkan.

Kemampuan memotivasi adalah aspek penting lain dalam kepemimpinan nasional. Pemimpin yang efektif mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan, menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab di antara warga negara. Keterampilan komunikasi yang baik juga sangat penting, karena pemimpin harus mampu menyampaikan ide dan kebijakan dengan jelas dan efektif kepada publik. Masyarakat perlu memahami tujuan dan manfaat dari kebijakan yang diterapkan, agar dapat memberikan dukungan yang diperlukan untuk kesuksesan program-program tersebut. Kepemimpinan kolaboratif mencerminkan pendekatan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pemimpin yang kolaboratif tidak hanya mengandalkan kekuasaan resmi, tetapi juga melibatkan masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menciptakan lingkungan yang inklusif dan demokratis, di mana setiap suara didengar dan dihargai. Dengan demikian, kepemimpinan nasional yang efektif adalah yang dapat menggabungkan semua karakteristik tersebut untuk menciptakan kinerja yang optimal dalam pengelolaan negara.

Dalam konteks sosial-politik, terdapat beberapa tipe kepemimpinan yang relevan dan memiliki dampak signifikan terhadap arah pembangunan suatu negara. Salah satu tipe kepemimpinan yang sering dijumpai adalah kepemimpinan otokratis. Dalam tipe ini, pemimpin mengambil keputusan secara unilateral tanpa melibatkan banyak pihak. Meskipun dapat mengakselerasi pengambilan keputusan dalam situasi krisis, kepemimpinan otokratis berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, karena mereka merasa tidak terlibat dalam proses yang memengaruhi kehidupan mereka. Di sisi lain, kepemimpinan demokratik menjadi pilihan yang lebih inklusif dan partisipatif. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan ini lebih terbuka terhadap masukan dari masyarakat. Mereka sering kali mengadakan forum atau konsultasi publik untuk mendengarkan pendapat dan aspirasi warganya. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pemimpin demokratik menciptakan rasa memiliki yang lebih besar di antara warga negara, sehingga kebijakan yang diambil lebih mudah diterima dan diimplementasikan.

Kepemimpinan transformasional juga menjadi salah satu tipe kepemimpinan yang relevan dalam konteks sosial-politik. Pemimpin transformasional berfokus pada perubahan

dan inovasi, berusaha menginspirasi pengikut untuk mengadopsi visi baru dan melakukan perubahan positif. Mereka tidak hanya melihat tantangan sebagai hambatan, tetapi sebagai peluang untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik. Pendekatan ini sering kali melibatkan pengembangan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat, sehingga menciptakan dampak jangka panjang yang berkelanjutan. Kepemimpinan servant, yang menekankan pelayanan kepada masyarakat, juga semakin relevan dalam konteks saat ini. Pemimpin yang mengadopsi pendekatan ini memprioritaskan kepentingan dan pengembangan orang lain. Mereka berfungsi sebagai pelayan masyarakat, yang bertujuan untuk membantu warga mencapai potensi terbaik mereka. Dengan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat, kepemimpinan servant menciptakan hubungan yang lebih dekat antara pemimpin dan rakyat, yang pada gilirannya dapat memperkuat kohesi sosial dan stabilitas politik.

Dalam pengelolaan negara, terdapat perbedaan penting antara kepemimpinan formal dan informal. Kepemimpinan formal adalah kepemimpinan yang dijalankan oleh individu atau kelompok yang memiliki posisi resmi dalam struktur pemerintahan. Contohnya adalah presiden, menteri, dan anggota legislatif. Mereka memiliki wewenang yang sah dan diakui secara hukum, serta bertanggung jawab kepada publik dan lembaga negara. Keputusan yang diambil oleh pemimpin formal biasanya memiliki dampak langsung terhadap kebijakan dan arah pembangunan negara. Di sisi lain, kepemimpinan informal muncul tanpa mandat resmi dan sering kali berdasarkan pengaruh, keahlian, atau karisma individu. Tokoh masyarakat, pemimpin komunitas, dan aktivis sering kali menjadi contoh dari pemimpin informal. Meskipun mereka tidak memiliki kekuasaan resmi, mereka dapat mempengaruhi opini publik dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai isu sosial dan politik. Kepemimpinan informal sering kali berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, membantu menyampaikan aspirasi dan kebutuhan warga kepada pemimpin formal.

Perbedaan antara kedua tipe kepemimpinan ini sangat penting dalam konteks pengelolaan negara. Kepemimpinan formal cenderung berfokus pada pengambilan keputusan yang terstruktur dan berdasarkan hukum, sementara kepemimpinan informal lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang. Dalam banyak kasus, kombinasi dari kedua tipe kepemimpinan ini dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam pengelolaan negara. Pemimpin formal yang mampu mendengarkan dan melibatkan pemimpin informal dalam proses pengambilan keputusan dapat menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan diterima oleh masyarakat.

b. Stabilitas Sosial dan Politik: Definisi dan Indikator

Stabilitas sosial dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana interaksi antarindividu dan kelompok dalam masyarakat berlangsung harmonis, tanpa adanya gangguan atau konflik yang signifikan. Hal ini mencakup keseimbangan dalam hubungan sosial, keadilan dalam distribusi sumber daya, dan kemampuan masyarakat untuk menyelesaikan perbedaan secara damai. Menurut Galtung (1996), stabilitas sosial tercapai ketika kondisi sosial yang mendukung keadilan dan kesejahteraan terjaga, sehingga memungkinkan kerukunan antar kelompok.

Sementara itu, stabilitas politik didefinisikan sebagai keadaan di mana sistem pemerintahan berfungsi dengan baik dan masyarakat memiliki kepercayaan terhadap institusi politik. Stabilitas politik mencakup kelangsungan pemerintahan, kepatuhan terhadap hukum, serta dukungan masyarakat terhadap keputusan politik. Dalam konteks ini, Huntington (1996) menunjukkan bahwa stabilitas politik tidak hanya bergantung pada kekuatan pemerintah, tetapi juga pada legitimasi dan dukungan yang diperoleh dari

masyarakat. Dengan demikian, stabilitas sosial dan politik saling terkait; stabilitas sosial yang baik mendukung stabilitas politik, dan sebaliknya.

c. Peran Kepemimpinan dalam Stabilitas Sosial

Kepemimpinan memainkan peran krusial dalam menciptakan stabilitas sosial di suatu negara, terutama di negara yang kaya akan keberagaman seperti Indonesia. Dalam konteks ini, pemimpin tidak hanya bertanggung jawab untuk mengelola pemerintahan, tetapi juga untuk menciptakan harmoni sosial di tengah keragaman budaya dan agama. Materi ini akan membahas strategi kepemimpinan dalam menciptakan harmoni sosial, peran kebijakan inklusif dalam mengelola keberagaman, serta studi kasus mengenai peran pemimpin dalam meredakan konflik sosial.

Salah satu strategi utama yang dapat diterapkan oleh pemimpin dalam menciptakan harmoni sosial adalah melalui **dialog lintas budaya dan agama**. Dialog ini penting untuk membangun pengertian dan toleransi antar kelompok yang berbeda. Pemimpin yang proaktif dalam menginisiasi dialog dapat menciptakan ruang bagi setiap kelompok untuk menyuarakan pendapat dan perasaannya. Menurut Abu-Nimer (2001), dialog antarbudaya dapat membantu mengurangi prasangka dan stereotip yang sering kali menjadi penyebab konflik.

Pemimpin juga dapat memfasilitasi kegiatan yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat dalam bentuk seminar, lokakarya, dan acara budaya. Ini tidak hanya menciptakan kesadaran tentang pentingnya keberagaman, tetapi juga memperkuat jaringan sosial antar kelompok. Selain itu, pemimpin yang menunjukkan sikap inklusif dan menghormati perbedaan akan mampu memperkuat legitimasi mereka di mata masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Putnam (2000) yang menyatakan bahwa interaksi sosial yang positif dapat meningkatkan kepercayaan dan solidaritas di antara warga negara.

Kebijakan inklusif merupakan bagian penting dari strategi kepemimpinan untuk mengelola keberagaman. Kebijakan ini mencakup pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak semua kelompok dalam masyarakat, termasuk kelompok minoritas. Pemimpin yang menerapkan kebijakan inklusif akan memastikan bahwa semua suara didengar dan mendapatkan kesempatan yang sama dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Menurut Sen (2009), pendekatan inklusif tidak hanya mendukung keadilan sosial tetapi juga memperkuat stabilitas politik.

Salah satu contoh kebijakan inklusif dapat dilihat dalam pendidikan. Pemimpin dapat mendorong kurikulum pendidikan yang menghargai keberagaman budaya dan agama, sehingga generasi muda dapat tumbuh dengan pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan. Selain itu, kebijakan yang mendukung partisipasi perempuan dan kelompok marginal dalam proses pengambilan keputusan juga sangat penting. Dengan demikian, kebijakan inklusif tidak hanya mengurangi ketegangan sosial tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial yang berkelanjutan.

d. Tantangan dan Hambatan dalam Kepemimpinan Nasional

Kepemimpinan nasional menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang kompleks, yang dapat memengaruhi efektivitas pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Dalam konteks ini, tantangan tersebut muncul dari dinamika politik domestik dan tekanan global, hambatan internal yang terkait dengan praktik korupsi dan konflik kepentingan, serta tantangan era digital yang ditandai oleh disinformasi dan polarisasi masyarakat. Materi ini akan membahas masing-masing aspek tersebut secara mendetail.

Dinamika politik di dalam negeri sering kali menjadi tantangan utama bagi pemimpin

nasional. Perubahan kebijakan, pergeseran aliansi politik, dan ketidakpastian dalam proses legislatif dapat memengaruhi stabilitas pemerintahan. Seperti yang diungkapkan oleh Huntington (1991), perubahan dalam sistem politik dapat menciptakan ketidakpastian yang memengaruhi keputusan pemimpin. Tekanan dari partai politik oposisi, serta tuntutan dari masyarakat yang semakin kritis, juga dapat menghambat implementasi kebijakan yang diinginkan.

Selain itu, tekanan global, seperti perubahan ekonomi internasional, kebijakan luar negeri negara lain, dan isu-isu global seperti perubahan iklim, juga memengaruhi keputusan pemimpin. Dalam era globalisasi, pemimpin harus mempertimbangkan dampak dari keputusan mereka tidak hanya pada tingkat domestik, tetapi juga pada hubungan internasional. Menurut Keohane dan Nye (2000), interdependensi global membuat pemimpin harus lebih responsif terhadap dinamika internasional. Sebagai contoh, kebijakan perdagangan yang diterapkan oleh suatu negara dapat berdampak langsung pada ekonomi dan stabilitas politik domestik. Ketidakmampuan untuk menyeimbangkan kepentingan domestik dengan tekanan global dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

Hambatan internal menjadi tantangan signifikan dalam kepemimpinan nasional. Salah satu masalah utama adalah **korupsi**, yang tidak hanya merusak integritas pemerintah tetapi juga mengurangi kepercayaan publik. Korupsi dapat mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan sosial dan ekonomi, serta menghambat investasi. Menurut Transparency International (2020), tingkat korupsi yang tinggi di suatu negara dapat mengakibatkan ketidakpastian politik dan ekonomi, yang pada gilirannya memengaruhi stabilitas sosial. Pemimpin yang tidak mampu memberantas korupsi akan menghadapi kesulitan dalam mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Selain korupsi, **konflik kepentingan** juga menjadi hambatan yang serius. Ketika pemimpin atau pejabat publik memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan publik, keputusan yang diambil dapat merugikan masyarakat. Hal ini sering kali menyebabkan kebijakan yang tidak efektif dan mengurangi legitimasi pemerintah. Menurut Lawton et al. (2000), pengelolaan yang buruk terhadap konflik kepentingan dapat mengarah pada ketidakpuasan publik dan erosi kepercayaan terhadap institusi.

Kurangnya **dukungan publik** juga merupakan tantangan yang signifikan. Pemimpin yang tidak mampu membangun koneksi dengan masyarakat atau memahami kebutuhan dan aspirasi mereka akan kesulitan dalam mendapatkan dukungan untuk kebijakan yang diusulkan. Survei opini publik dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana kebijakan diterima oleh masyarakat, tetapi jika pemimpin mengabaikan masukan dari rakyat, hal ini dapat berakibat fatal bagi stabilitas pemerintahan.

Era digital menghadirkan tantangan baru bagi kepemimpinan nasional, terutama dalam hal **disinformasi** dan **polarisasi masyarakat**. Dengan kemajuan teknologi informasi, berita palsu dan informasi yang tidak akurat dapat menyebar dengan cepat, memengaruhi opini publik dan menciptakan kebingungan. Disinformasi dapat mengganggu proses demokrasi dan membentuk persepsi yang salah tentang kebijakan pemerintah, yang pada gilirannya dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemimpin. Menurut Vosoughi, Roy, dan Aral (2018), disinformasi lebih cepat menyebar dibandingkan informasi yang benar, terutama di platform media sosial.

Polarisasi masyarakat juga semakin meningkat, di mana kelompok-kelompok dalam masyarakat menjadi semakin terpisah berdasarkan pandangan politik, sosial, dan budaya. Pemimpin yang tidak mampu menjembatani perbedaan ini dapat menghadapi kesulitan dalam menciptakan konsensus dan stabilitas. Polarasi dapat menghambat dialog dan

kerjasama antar kelompok, sehingga mengganggu proses pengambilan keputusan yang efektif. Sebagaimana diungkapkan oleh McCoy, Rahman, dan Somer (2018), polarisasi yang tinggi dapat merusak kohesi sosial dan mengancam integritas politik.

e. Perspektif Masa Depan dan Rekomendasi

Dalam menghadapi tantangan yang kompleks di era modern, kepemimpinan nasional perlu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan sosial dan teknologi. Pentingnya kepemimpinan adaptif, peran pendidikan dalam pengembangan karakter pemimpin, serta rekomendasi kebijakan yang visioner akan menjadi fokus pembahasan ini. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan stabilitas sosial dan politik dapat diperkuat di masa depan.

Kepemimpinan adaptif menjadi semakin penting dalam konteks perubahan sosial dan teknologi yang cepat. Pemimpin yang adaptif mampu merespons perubahan dengan cepat dan efektif, memahami dinamika baru yang muncul, serta mengantisipasi kebutuhan masyarakat. Menurut Heifetz dan Laurie (1997), pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu menavigasi ketidakpastian dan kompleksitas, serta menciptakan solusi yang inovatif.

Perubahan sosial, seperti pergeseran nilai-nilai masyarakat dan meningkatnya kesadaran akan isu-isu sosial, memerlukan pemimpin yang mampu mendengar dan memahami aspirasi publik. Di sisi lain, kemajuan teknologi, terutama dalam bidang komunikasi dan informasi, memberikan tantangan sekaligus peluang bagi pemimpin. Dengan memanfaatkan teknologi, pemimpin dapat berinteraksi lebih langsung dengan masyarakat dan mendapatkan masukan yang berharga. Namun, tantangan seperti disinformasi dan polarisasi masyarakat juga memerlukan kecerdasan emosional dan keterampilan komunikasi yang tinggi dari seorang pemimpin.

Oleh karena itu, penting bagi pemimpin untuk mengembangkan kemampuan adaptif yang tidak hanya mencakup pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan interpersonal dan emosional. Hal ini sejalan dengan pandangan Goleman (2000) yang menekankan bahwa kecerdasan emosional adalah kunci keberhasilan dalam kepemimpinan.

Pendidikan memainkan peran vital dalam membentuk karakter pemimpin di masa depan. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya fokus pada penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga pada pengembangan nilai-nilai etika, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial. Menurut Dewey (1916), pendidikan harus berorientasi pada pengalaman dan keterlibatan, sehingga siswa dapat belajar untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan sensitif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pengembangan karakter pemimpin harus dimulai sejak dini, dengan memasukkan kurikulum yang menekankan pada kepemimpinan, kerjasama, dan nilai-nilai kemanusiaan. Program pelatihan kepemimpinan yang melibatkan praktik langsung dan pengalaman nyata juga penting untuk mempersiapkan calon pemimpin menghadapi tantangan di masa depan. Selain itu, keterlibatan dalam kegiatan sosial dan komunitas dapat memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika masyarakat dan cara mengelola konflik.

Pendidikan tinggi juga harus beradaptasi dengan kebutuhan zaman, dengan menawarkan program-program yang relevan yang mengajarkan keterampilan inovatif, pemecahan masalah, dan kolaborasi lintas disiplin. Dengan demikian, pemimpin masa depan akan lebih siap untuk menghadapi tantangan dan menciptakan perubahan positif di masyarakat.

Untuk memperkuat stabilitas sosial dan politik melalui kepemimpinan nasional yang visioner, beberapa rekomendasi kebijakan dapat diusulkan:

1. **Promosi Kepemimpinan Adaptif:** Pemerintah perlu mendorong pelatihan dan pengembangan pemimpin yang adaptif melalui program-program pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada pengembangan keterampilan interpersonal dan kemampuan untuk merespons perubahan.
2. **Penguatan Kebijakan Inklusif:** Kebijakan yang mendukung inklusi sosial dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan harus diprioritaskan. Ini mencakup dukungan untuk kelompok minoritas dan penguatan peran masyarakat sipil dalam proses politik.
3. **Pendidikan Karakter dan Kepemimpinan:** Mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum pendidikan di semua tingkat. Program-program yang menekankan pada nilai-nilai etika, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial harus didorong.
4. **Utilisasi Teknologi untuk Dialog Sosial:** Pemerintah harus memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan dialog antar kelompok dan menyediakan platform bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan masukan. Ini juga termasuk upaya melawan disinformasi dengan meningkatkan literasi media di kalangan masyarakat.
5. **Kolaborasi Lintas Sektor:** Mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan. Kerja sama ini dapat menciptakan solusi yang lebih inovatif dan efektif untuk tantangan yang dihadapi masyarakat.

Pembahasan

Dalam menghadapi tantangan yang kompleks di era modern, kepemimpinan nasional perlu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan sosial dan teknologi. Pentingnya kepemimpinan adaptif, peran pendidikan dalam pengembangan karakter pemimpin, serta rekomendasi kebijakan yang visioner akan menjadi fokus pembahasan ini. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan stabilitas sosial dan politik dapat diperkuat di masa depan. Kepemimpinan adaptif menjadi semakin penting dalam konteks perubahan sosial dan teknologi yang cepat. Pemimpin yang adaptif mampu merespons perubahan dengan cepat dan efektif, memahami dinamika baru yang muncul, serta mengantisipasi kebutuhan masyarakat. Menurut Heifetz dan Laurie (1997), pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu menavigasi ketidakpastian dan kompleksitas, serta menciptakan solusi yang inovatif.

Perubahan sosial, seperti pergeseran nilai-nilai masyarakat dan meningkatnya kesadaran akan isu-isu sosial, memerlukan pemimpin yang mampu mendengar dan memahami aspirasi publik. Di sisi lain, kemajuan teknologi, terutama dalam bidang komunikasi dan informasi, memberikan tantangan sekaligus peluang bagi pemimpin. Dengan memanfaatkan teknologi, pemimpin dapat berinteraksi lebih langsung dengan masyarakat dan mendapatkan masukan yang berharga. Namun, tantangan seperti disinformasi dan polarisasi masyarakat juga memerlukan kecerdasan emosional dan keterampilan komunikasi yang tinggi dari seorang pemimpin. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin untuk mengembangkan kemampuan adaptif yang tidak hanya mencakup pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan interpersonal dan emosional. Hal ini sejalan dengan pandangan Goleman (2000) yang menekankan bahwa kecerdasan emosional adalah kunci keberhasilan dalam kepemimpinan.

Pendidikan memainkan peran vital dalam membentuk karakter pemimpin di masa depan. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya fokus pada penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga pada pengembangan nilai-nilai etika, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial. Menurut Dewey (1916), pendidikan harus berorientasi pada

pengalaman dan keterlibatan, sehingga siswa dapat belajar untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan sensitif terhadap kebutuhan masyarakat. Pengembangan karakter pemimpin harus dimulai sejak dini, dengan memasukkan kurikulum yang menekankan pada kepemimpinan, kerjasama, dan nilai-nilai kemanusiaan. Program pelatihan kepemimpinan yang melibatkan praktik langsung dan pengalaman nyata juga penting untuk mempersiapkan calon pemimpin menghadapi tantangan di masa depan. Selain itu, keterlibatan dalam kegiatan sosial dan komunitas dapat memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika masyarakat dan cara mengelola konflik.

Pendidikan tinggi juga harus beradaptasi dengan kebutuhan zaman, dengan menawarkan program-program yang relevan yang mengajarkan keterampilan inovatif, pemecahan masalah, dan kolaborasi lintas disiplin. Dengan demikian, pemimpin masa depan akan lebih siap untuk menghadapi tantangan dan menciptakan perubahan positif di masyarakat.

KESIMPULAN

Kepemimpinan yang adaptif, pendidikan yang berkualitas, dan kebijakan yang inklusif merupakan fondasi utama untuk membangun stabilitas sosial dan politik di masa depan. Ketiga elemen ini saling melengkapi dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing. Kepemimpinan adaptif memungkinkan pemimpin merespons perubahan, mengantisipasi tantangan global, dan memahami kebutuhan masyarakat. Pemimpin yang peka terhadap situasi sosial dan ekonomi dapat mengambil keputusan strategis yang mengarahkan bangsa menuju pembangunan berkelanjutan.

Sementara itu, pendidikan berkualitas memainkan peran penting dalam membentuk individu yang berpikir kritis, kreatif, dan memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan tidak hanya berfokus pada kompetensi akademis tetapi juga pada pembentukan karakter, sehingga generasi muda siap menghadapi tantangan zaman dan berkontribusi pada pembangunan nasional. Pendidikan yang inklusif juga memastikan akses yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga tidak ada yang tertinggal dalam proses pembangunan.

Kebijakan inklusif dan dialogis melengkapi dua elemen tersebut dengan memberikan ruang partisipasi kepada semua pihak. Kebijakan ini memungkinkan masyarakat merasa didengar dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga tercipta stabilitas sosial dan politik. Dalam era penuh tantangan ini, kepemimpinan yang visioner dan responsif, pendidikan yang bermutu, serta kebijakan yang adil menjadi kunci keberhasilan menciptakan masyarakat harmonis dan damai.

REFERENSI

- Basit, A. (2021). Stabilitas politik dan keamanan sebagai prasyarat pembangunan nasional. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(2), 123-135.
- Syarofuzzaman, M., & Al-Hamid, R. (2024). Polarisasi masyarakat akibat penggunaan buzzer politik. *Jurnal Politik Indonesia*, 9(1), 45-60.
- Widhi Cahyono, A., et al. (2021). Kepemimpinan nasional untuk harmoni sosial di tengah keberagaman. *Jurnal Kepemimpinan dan Inklusi Sosial*, 7(3), 87-102.
- Heifetz, R., & Laurie, D. (1997). The work of leadership. *Harvard Business Review*, 75(1), 124-134.
- Putnam, R. D. (2000). Social capital: Its impact on society and democracy. *Journal of Democracy*, 11(3), 65-78.
- Basit, A. (2021). *Analisis Pengaruh Stabilitas Politik Dan Faktor Ekonomi Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan*.

- Creswell, J. (2013). *Research Design Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches* (Fourth Edition). Sage Publications.
- Syarofuzzaman, A. F., & Al-Hamid, R. (2024). *Politeia: Jurnal Ilmu Politik Dinamika Stabilitas Politik Di Indonesia Ditinjau Dari Pemikiran Politik Kekuasaan Nicholas Machiavelli*. 16(01), 22–29. <https://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle>
- Widhi Cahyono, A., Guyana Sekolah Staf Dan Komando Angkatan Laut, D., Kunci, K., Birokrasi, R., & Angkatan Laut, T. (2021). *Ekonomi Nasional Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rangka Terwujudnya Indonesia Tangguh Ditinjau Dari Perspektif Kepemimpinan Strategis*.

Copyright holder :

© Penulis 1 2 dan 3 dengan model APA

First publication right:

Jurnal Kepemimpinan & Pengurusan Sekolah

This article is licensed under:

